



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Isu-isu Strategis	9
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	15
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	17
2.4 Perjanjian Kinerja	35
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	37
BAB III	43
AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	43
3.2. Realisasi Anggaran	54
3.3 INOVASI	55
3.4 PENGHARGAAN	56
BAB IV	57
PENUTUP	57
4.1. KESIMPULAN	57
4.2. REKOMENDASI	58
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . 1 Jumlah Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pegawai	11
Tabel 1 . 2 Jumlah Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1 . 3 DATA SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA	12
Tabel 1 . 4 SARAN/ REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025	13
Tabel 1 . 5 TINDAK LANJUT/RENCANA AKSI SARAN REKOMENDASI PADA LKjIP TAHUN SEBELUMNYA	14
Tabel 2. 1 KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH	15
Tabel 2. 2 KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, SATUAN DAN TARGET BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH	16
Tabel 2. 3 KETERKAITAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH.....	16
Tabel 2. 4 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH.....	17
Tabel 2. 5 KETERKAITAN PERJANJIAN KINERJA BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH	36
Tabel 2. 6 KETERKAITAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH	36
Tabel 3 . 1 CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 DAN TARGET AKHIR RPD.....	44
Tabel 3 . 2 CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025.....	45
Tabel 3 . 3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2025.....	46
Tabel 3 . 4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR TAHUN 2026 BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH	46
Tabel 3 . 5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH	47
Tabel 3 . 6 PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN/KEUANGAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025	48
Tabel 3 . 7 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET TAHUN 2024 BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH	49
Tabel 3 . 8 REALISASI ANGGARAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 3. 1 Gambar Satu Klik SIMAPAN SDM.....	55
Gambar 3. 4. 1 Piagam Penghargaan Manunggal Leadership Retret.....	56
Gambar 3. 4. 2 Piagam Penghargaan KIP Awards Tahun 2025	56

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Rancangan Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Semarang,

2026

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Perbina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan nasional dan daerah, serta pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat sekaligus menjadi *Problem Solving* atas permasalahan yang terjadi di Jawa Tengah, diperlukan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan yang berkualitas, memiliki integritas dan profesionalisme, serta berkompeten dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Sumber Daya Manusia adalah salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam suatu Organisasi Pemerintah. Segala potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk upaya dalam meraih keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut juga selaras dalam kebutuhan sebuah negara dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sumber daya strategis yang berperan menunjang kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam pasal 11 disebutkan bahwa tugas utama pegawai ASN salah satunya adalah "Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas".

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang menjadi kewenangan daerah. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dibentuk untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia ASN yang kompeten, profesional, dan berintegritas melalui Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang prima (*Excellence Public Service*). Oleh karena itu, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran pencapaian kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas dalam rangka

mendorong terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ini, diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam periode Tahun Anggaran 2024.
2. Mendorong BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan kinerja.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan penerima manfaat atas kinerja yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengembangan kompetensi ASN.

1.2. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi isu-isu strategis dilakukan melalui teknik *focus group discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar dalam merumuskan isu strategis, yang kemudian diadakan pembobotan terhadap isu-isu terpilih. Isu-isu itu pun sudah diuji melalui beberapa tolok ukur, diantaranya: aktualitas (seberapa besar isu menjadi pusat perhatian), problematik (seberapa kompleks isu tersebut membutuhkan upaya penyelesaian), kekhayalakan (seberapa besar dampak yang ditimbulkan isu apabila tidak diselesaikan) dan layak (seberapa sesuai isu dengan tugas pokok dan fungsi). Melihat dari gambaran pelayanan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah maka dapat ditentukan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan kompetensi aparatur di Jawa Tengah. Dari hasil pembobotan terhadap isu-isu tersebut, maka dipilihlah isu isu strategis sebagai berikut:

1. *Disruption Era* (V.U.C.A) Dunia telah memasuki era VUCA yang penuh ketidakpastian.

- Kebijakan pasca penyederhanaan birokrasi menjadi titik penting mengedepankan pengembangan kompetensi secara terintegrasi. Pengembangan Kompetensi didorong untuk mencapai tujuan organisasi, Bukan hanya sekedar memenuhi hak pegawai.
2. Peran *Corporate University (Corpu)* Dalam Strategi Pengembangan Kompetensi. Mengidentifikasi, menilai dan mengembangkan pengetahuan, keahlian Rencana Strategis (Renstra) serta kemampuan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Sehingga organisasi dapat beradaptasi lebih cepat menghadapi dinamika perubahan, menuntut organisasi menjadi *agile* dan memiliki *learning culture*. Memastikan keberlangsungan ketersediaan talent dengan membantu pegawai mengembangkan potensinya sebagai sebagai penerus posisi penting, sehingga regenerasi terjamin.
 3. Transformasi Paradigma Pengembangan Kompetensi. Transformasi dari *Training and Development* ke *In Learning Development*. Transformasi pembelajaran digital efektivitas pembelajaran dan efisiensi anggaran. Metode *e-learning, blended learning, distance learning* sebagai satu metode pembelajaran menjadi semakin dibutuhkan pada saat dunia dihadapkan pada percepatan teknologi.
 4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan jumlah Anggaran Pengembangan Kompetensi sebesar 0,34% dari APBD Provinsi. Yang mana diketahui bahwa pelatihan yang bersifat klasikal tentu membutuhkan banyak biaya, sementara pemerintah memiliki anggaran yang terbatas. Yaitu dengan Inovasi Variasi Pengembangan Kompetensi sesuai dengan Per LAN 10 Tahun 2018, serta Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi khususnya yang terkait dengan Teknologi Informasi untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan secara *e learning, blended learning, distance learning* dll.
 5. Birokrasi Berkelas Dunia Menuju *SMART* ASN 2024. Pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan visi Presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam visi tersebut, pengembangan ASN menjadi salah satu prioritas kerja. SDM aparatur yang bekerja keras, melayani masyarakat, dinamis, terampil serta memiliki kemampuan dalam penguasaan IPTEK, hal ini menjadi dasar untuk mewujudkan ASN berkelas dunia pada tahun 2024.

1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan Sumber Daya Manusia yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data per Januari 2025, sebanyak 211 orang pegawai, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1 . 1

Jumlah Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pegawai

Jenis Pegawai	Jumlah
PNS	116
PPPK	18
PPPK Paruh Waktu	22
Tenaga <i>Outsourcing</i>	109
JUMLAH	265

Tabel 1 . 2

Jumlah Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki – laki	195
Perempuan	70
JUMLAH	265

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN, selain didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga didukung dengan adanya Fasilitas (Sarana dan Prasarana) yang sangat memadai. Fasilitas tersebut terdiri dari sarana dan prasarana utama, serta sarana dan prasarana pendukung yang dapat menunjang kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Penyelenggara Kegiatan Pelatihan. Fasilitas Sarana dan Prasarana yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, secara lebih rinci akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 . 3

DATA SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

NO	GEDUNG/ RUANG	JUMLAH	KAPASITAS
1	Balai SASANA WIDYA PRAJA	1 Unit	500 Orang
2	Aula MURIA	1 Unit	300 Orang
3	Gedung Pendidikan Eksekutif MERAPI	1 Unit	190 Orang
4	Gedung Pendidikan SINDORO	1 Unit	400 Orang
5	Gedung Pendidikan MERBABU	1 Unit	400 Orang
6	Gedung Pendidikan MURIA	1 Unit	80 Orang
7	Gedung Pendidikan SUMBING I	1 Unit	320 Orang
8	Gedung Pendidikan SUMBING II	1 Unit	230 Orang
9	Asrama SINDORO I, II, dan III	3 Unit	336 Orang
10	Asrama MURIA I dan II	2 Unit	76 Orang
11	Asrama SUMBING I, II, III, dan IV	4 Unit	308 Orang
12	Asrama Eksekutif MERAPI	1 Unit	100 Orang
JUMLAH		18 Unit	3.240 Orang

1.4. Sistematika Penulisan**Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Bab III Akuntabilitas Kinerja**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025

Tabel 1 . 4

SARAN/ REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menyeleraskan <i>output</i> dan target triwulan capaian kinerja pada dokumen Indikator Kinerja Individu (IKU) Tahun 2025 dengan <i>e-controlling</i> kinerja Tahun 2025	<i>Output</i> dan target triwulan kinerja telah diseleraskan dengan <i>e-controlling</i> kinerja tahun 2025
2.	Melakukan pemberian <i>reward</i> kepada unit/ individu dan	Instrumen dan pedoman pemberian <i>reward</i> kepada unit/individu terhadap penilaian kinerja sedang disusun di tahun

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	menetapkan pedoman penilaian disertai instrument Pengukuran Kinerja sebagai salah satu komponen penilaian	2025

1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD

Tabel 1 . 5
**TINDAK LANJUT/RENCANA AKSI SARAN REKOMENDASI
 PADA LKjIP TAHUN SEBELUMNYA**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Dalam penyusunan PK agar berpedoman pada cascading yang telah ditetapkan	Perjanjian Kinerja yang disusun telah berpedoman kepada cascading yang telah ditetapkan
2.	Untuk membuat pakta integritas pada jajaran eselon III, Eselon IV dan Staf	Pakta Integritas pada jajaran eselon III, Eselon IV dan Staf akan di proses, selama ini Pakta Integritas dibuat untuk Eselon II
3	Menindaklanjuti rekomendasi LKjIP Tahun 2021, 2022 pada BAB IV untuk perbaikan capaian kinerja tahun yang akan datang	Peningkatan capaian kinerja secara optimal dicapai melalui metode pengembangan kompetensi secara virtual, blended dan MOOC
4	Memberikan reward dan punishment kepada seluruh unit kerja terhadap capaian kinerja	Terkait rewards, telah diberikan kepada ASN yang berperan dalam mendukung kinerja masing-masing unit kerjanya namun belum diukur menggunakan LKj dan Kinerja Individu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok fungsinya sebagai Badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan daerah yang tentu saja sejalan untuk mendukung 136 program prioritas daerah yang mengacu kepada visi Gubernur Jawa Tengah "Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045". Adapun BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mendukung pada Program Prioritas Pertama yaitu Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.

Adapun keberhasilan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran akan dijelaskan lebih rinci dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2. 1

KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kompetensi ASN		Indeks Kompetensi ASN	3,07	3,08	3,10
		1.1	Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN	8,67	17,34	26,10
		1.2	Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN	100	100	100
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah)		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah	72	73	74
		2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	80	80	80
		2.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	3	3,05	3,10

Sumber : RPD BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang harus dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2025 yang merupakan awal dari masa RPD tahun 2024-2026 dijelaskan lebih rinci dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2. 2

KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, SATUAN DAN TARGET BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatkan Kompetensi ASN		Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,07	
		1.1	Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	8,67
		1.2	Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah)		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah	Angka	72	
		2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80
		2.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3

Tabel 2. 3

KETERKAITAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi baik klasikal dan Non Klasikal secara terintegrasi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian strategi organisasi dan arah kebijakan pembangunan	Sinergitas Pengembangan Kompetensi di Jawa Tengah guna akselerasi pencapaian Birokrasi Kelas Dunia : 1. Memperkuat Koordinasi dan Kolaborasi dengan Institusi Utama Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur (BKD, Biro Organisasi, BPSDMD) (Kolaborasi intensif dengan stakeholder Bangkom) 2. Pengembangan Teknologi dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur. 3. Mengembangkan kurikulum pembelajaran sesuai dengan kebutuhan/permasalahan tujuan organisasi.
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN melalui program pengembangan talenta ASN, sebagai dasar dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan	
		Kolaborasi BKD, Biro Organisasi dalam penyelenggaraan Manajemen talenta dan Jateng CORPU	

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi bagi PNS dilaksanakan dengan pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) PP 17 2020 tentang Manajemen PNS	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kebutuhan perkantoran, kepegawaian dan keuangan administrasi pelayanan	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	1.Mengoptimalkan Sistem Informasi yang terintegrasi dan Sarpras berbasis digital untuk mewujudkan Techno Training Center 2.Mendorong penguatan kelembagaan PPID 3.Melakukan Identifikasi Resiko, Analisis Resiko serta Rencana Tindak Pengendalian atas resiko yang dimungkinkan terjadi	

Target dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan Rencana Kinerja tahun kedua dari masa transisi menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, yang pada tahun 2025 menjadi awal kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Masa Periode 2025 – 2029 sehingga target Rencana Kinerja Tahun 2025 telah disesuaikan terutama berubahnya pola pelaksanaan pengembangan kompetensi lebih mengedepankan digitalisasi.

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2. 4

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN									15.836.640.000		35.095.555.000		30.731.723.000
						Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,08		3,08		3,08	
TERPENUHINYA HAK PEMBANGUNAN KOMPETENSI ASN									15.836.640.000		35.095.555.000		30.731.723.000
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui	%	17,34	15.436.640.000	17,34	34.695.555.000	17,34	30.338.458.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						pengembangan kompetensi							
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						15.436.640.000		34.695.555.000		30.338.458.000
						Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Angka	3,5	416.885.000	3,5	416.885.000	3,5	326.466.000
		5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis					26.700.000		26.700.000		13.437.000
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	26700000	3	26700000	3	13.437.000
		5.04.02.1.01.0002			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				2.924.000		2.924.000		1.561.000
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	2.924.000	1	2.924.000	1	1.561.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.04.02. 1.01.000 4			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				23.776. 000		23.776. 000		11.876. 000
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dok ume n	15	4.224.0 00	15	4.224.0 00	15	1.225.0 00
						Jumlah pengembang an kompetensi yang dievaluasi	Ang ka	18	19.552. 000	18	19.552. 000	18	10.651. 000
		5.04.02. 1.02		Sertifik asi, Kelem bagaan , Penge mbang an Kompe tensi Manaj erial dan Fungsi onal					390.18 5.000		390.18 5.000		313.02 9.000
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembang an Kompetensi	Dok ume n	3	390185 000	3	390185 000	3	313.02 9.000
		5.04.02. 1.02.000 6			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				70.000. 000		70.000. 000		38.282. 000
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/dise mpurnakan	Dok ume n	10	70.000. 000	10	70.000. 000	9	38.282. 000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.04.02. 1.02.000 8			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				320.18 5.000		320.18 5.000		274.74 7.000
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	16	41.631.000	16	41.631.000	16	90.520.000
						Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	Dokumen	1	48.739.000	1	48.739.000	1	45.561.000
						Jumlah pelatihan yang diakreditasi	Jenis	3	167.267.000	3	167.267.000	3	65.572.000
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	26	62.548.000	26	62.548.000	26	73.094.000
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.735.079.000
		5.04.02. 1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					1.300.000.000		1.300.000.000		1.735.079.000
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang	1150	1300000000	1150	1300000000	1120	1.735.079.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.04.02. 1.02.000 7			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.300.000.000		1.300.000.000		1.735.079.000
					Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional		Orang	660	547.220.000	660	547.220.000	2374	1.165.612.000
					Jumlah peserta pelatihan penjurangan jabatan fungsional		Orang	250	448.644.000	250	448.644.000	365	314.288.000
					Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional		Orang	240	304.136.000	210	304.136.000	10260	255.179.000
					Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial		%	100	12.336.640.000	100	31.595.555.000	100	26.795.153.000
		5.04.02. 1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					12.336.640.000		31.595.555.000		26.795.153.000
					Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial		Orang	1320	1233664000	1320	3159555000	5822	26.795.153.000
		5.04.02. 1.02.000 7			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				12.336.640.000		31.595.555.000		26.795.153.000
					Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS		Orang	624	2.859.440.000	3446	14.906.505.000	3152	12.220.853.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Orang	240	3.768.900.000	200	3.140.750.000	120	1.701.333.000
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Orang	200	2.749.600.000	200	2.749.600.000	240	2.181.202.000
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	120	2.559.600.000	120	2.559.600.000	92	1.754.576.000
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	Orang	200	399.100.000	180	8.239.100.000	1150	8.937.189.000
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	%	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.287.516.000
		5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				1.200.000.000		1.200.000.000		1.287.516.000	
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	Orang	17320	1200000000	17320	1200000000	17320	1.287.516.000
		5.04.02.1.01.0003		Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1.200.000.000		1.200.000.000		1.287.516.000	
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	Orang	5760	381.000.000	5760	381.000.000	5800	410.311.000
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	Orang	5760	384.000.000	5760	384.000.000	5800	358.314.000
						Jumlah peserta pengembangan	Orang	5800	435.000.000	5800	435.000.000	5880	518.891.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						n kompetensi teknis umum							
						Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100	183.115.000	100	183.115.000	100	194.244.000
		5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis					121.250.000		121.250.000		86.349.000
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	121250000	3	121250000	3	86.349.000
		5.04.02.1.01.0001		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					21.250.000		21.250.000		7.405.000
						Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	270.000
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisis pengembangan kompetensi	Dokumen	2	19.750.000	2	19.750.000	2	7.135.000
		5.04.02.1.01.0002		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		78.944.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/dise mpurnakan	Dok ume n	18	100.00 0.000	18	100.00 0.000	17	78.944. 000
		5.04.02. 1.02		Sertifik asi, Kelem bagaan , Penge mbang an Kompe tensi Manaj erial dan Fungsi onal					61.865. 000		61.865. 000		107.89 5.000
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembang an Kompetensi	Dok ume n	3	618650 00	3	618650 00	3	107.89 5.000
		5.04.02. 1.02.000 1			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional				58.750. 000		58.750. 000		105.87 5.000
						Jumlah Metode Pengembang an Kompetensi yang disusun/dise mpurnakan	Dok ume n	1	1.500.0 00	1	1.500.0 00	1	925.00 0

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	Dokumen	2	17.250.000	2	17.250.000	2	14.698.000
						Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	20	40.000.000	20	40.000.000	40	90.252.000
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				3.115.000		3.115.000		2.020.000
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	3.115.000	1	3.115.000	1	2.020.000
	TERPENUHINYA KEBUTUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN								15.836.640.000		35.095.555.000		30.731.723.000
						Persentase ASN yang berkompent dan tersertifikasi	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	393.265.000
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						400.000.000		400.000.000		393.265.000
						Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	393.265.000
		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan					400.000.000		400.000.000		393.265.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
						Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi	Dokumen	2	400000000	2	400000000	2	393.265.000
		5.04.02.1.02.0002			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				25.437.000		25.437.000		9.813.000
						Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	Dokumen	2	10.459.000	2	10.459.000	2	7.139.000
						Jumlah kualifikasi asesor kompetensi yang dimiliki	Orang	3	14.978.000	3	14.978.000	2	2.674.000
		5.04.02.1.02.0003			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				374.563.000		374.563.000		383.452.000
						Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	Orang	150	374.563.000	150	374.563.000	200	383.452.000
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH									43.874.265.000		47.876.640.000		48.963.219.000
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	73		73		73	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								43.874.265.000		47.876.640.000		48.963.219.000
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	43.524.265.000	80	47.526.640.000	80	48.712.066.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						43.524.265.000		47.526.640.000		48.712.066.000
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	43.524.265.000	100	47.526.640.000	100	48.712.066.000
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					29.413.493.000		31.320.423.000		27.786.590.000
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	29413493000	6	31320423000	6	27.786.590.000
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				27.693.553.000		28.050.383.000		24.632.632.000
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	27.693.553.000	12	28.050.383.000	12	24.632.632.000
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.499.930.000		3.050.030.000		3.035.030.000
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1.499.930.000	1	3.050.030.000	1	3.035.030.000
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				82.174.000		82.174.000		39.503.000
						Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	82.174.000	1	82.174.000	1	39.503.000
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				78.868.000		78.868.000		51.560.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa	Laporan	1	78.868.000	1	78.868.000	1	51.560.000
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				58.968.000		58.968.000		27.865.000
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun	Laporan	1	58.968.000	1	58.968.000	1	27.865.000
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-		-		-
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	0	-	0	-	0	-
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					234.000.000		234.000.000		232.000.000
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	234000000	1	234000000	1	232.000.000
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				234.000.000		234.000.000		232.000.000
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	234.000.000	2	234.000.000	2	232.000.000
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendaan Daerah					79.990.000		79.990.000		39.694.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kewenangan Perangkat Daerah									
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	79990000	1	79990000	1	39.694.000
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				79.990.000		79.990.000		39.694.000
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Laporan	1	79.990.000	1	79.990.000	1	39.694.000
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					198.400.000		198.400.000		173.612.000
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	198400000	100	198400000	100	173.612.000
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-		-		-
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0	-	0	-	0	-
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				48.400.000		48.400.000		24.200.000
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	48.400.000	1	48.400.000	1	24.200.000
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		150.000.000		149.412.000
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	150.000.000	20	150.000.000	20	149.412.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01. 1.06		Admini strasi Umum Perang kat Daerah					2.088.9 82.000		2.088.9 82.000		1.502.8 50.000
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	10 0	208898 2000	10 0	208898 2000	10 0	1.502.8 50.000
		X.XX.01. 1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor				178.09 3.000		178.09 3.000		144.59 3.000
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor yang disediakan	Pak et	1	178.09 3.000	1	178.09 3.000	1	144.59 3.000
		X.XX.01. 1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				188.91 6.000		188.91 6.000		118.91 2.000
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pak et	1	188.91 6.000	1	188.91 6.000	1	118.91 2.000
		X.XX.01. 1.06.000 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				343.02 5.000		343.02 5.000		241.80 3.000
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Pak et	1	343.02 5.000	1	343.02 5.000	1	241.80 3.000
		X.XX.01. 1.06.000 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				305.26 0.000		305.26 0.000		245.18 5.000
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Pak et	1	305.26 0.000	1	305.26 0.000	1	245.18 5.000
		X.XX.01. 1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan				76.200. 000		76.200. 000		47.111. 000
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pak et	1	76.200. 000	1	76.200. 000	1	47.111. 000
		X.XX.01. 1.06.000 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				36.000. 000		36.000. 000		9.000.0 00
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Bula n	12	36.000. 000	12	36.000. 000	12	9.000.0 00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						yang disediakan							
		X.XX.01. 1.06.000 8			Fasilitasi Kunjungan Tamuh				105.40 0.000		105.40 0.000		92.300. 000
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamuh	Bulan	12	105.40 0.000	12	105.40 0.000	12	92.300. 000
		X.XX.01. 1.06.000 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				280.69 3.000		280.69 3.000		270.34 6.000
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Bulan	12	280.69 3.000	12	280.69 3.000	12	270.34 6.000
		X.XX.01. 1.06.001 0			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.505.0 00		8.505.0 00		8.505.0 00
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Bulan	12	8.505.0 00	12	8.505.0 00	12	8.505.0 00
		X.XX.01. 1.06.001 1			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				566.89 0.000		566.89 0.000		325.09 5.000
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	566.89 0.000	4	566.89 0.000	4	325.09 5.000
		X.XX.01. 1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					297.00 0.000		1.985.0 00.000		5.610.9 37.000
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Dokumen	1	297000 000	1	198500 0000	1	5.610.9 37.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01. 1.07.000 6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				218.00 0.000		256.00 0.000		2.685.9 37.000
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	11	218.00 0.000	12	256.00 0.000	21 8	2.685.9 37.000	
		X.XX.01. 1.07.000 7			Pengadaan Aset Tetap Lainnya			10.000. 000		10.000. 000		10.000. 000	
					Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000	
		X.XX.01. 1.07.001 0			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			69.000. 000		1.719.0 00.000		2.915.0 00.000	
					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	69.000. 000	3	1.719.0 00.000	15 5	2.915.0 00.000	
		X.XX.01. 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.725.6 00.000		9.725.6 00.000		9.698.2 90.000	
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	972560 0000	1	972560 0000	1	9.698.2 90.000	
		X.XX.01. 1.08.000 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.0 00		4.000.0 00		3.200.0 00	
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	4.000.0 00	12	4.000.0 00	12	3.200.0 00	
		X.XX.01. 1.08.000 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.252.0 00.000		2.252.0 00.000		2.642.7 50.000	
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	2.252.0 00.000	12	2.252.0 00.000	12	2.642.7 50.000	
		X.XX.01. 1.08.000 4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.469.6 00.000		7.469.6 00.000		7.052.3 40.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	7.469.600.000	12	7.469.600.000	12	7.052.340.000
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.486.800.000		1.894.245.000		3.668.093.000
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Dokumen	1	1486800000	1	1894245000	1	3.668.093.000
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.300.000		117.300.000		119.574.000
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Bulan	12	117.300.000	12	117.300.000	12	119.574.000
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				21.000.000		21.000.000		21.000.000
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Bulan	12	21.000.000	12	21.000.000	12	21.000.000
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				760.000.000		1.087.845.000		2.525.339.000
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	Bulan	12	760.000.000	12	1.087.845.000	12	2.525.339.000
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				588.500.000		668.100.000		1.002.180.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	Bulan	12	588.50 0.000	12	668.10 0.000	12	1.002.1 80.000
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								43.874. 265.00 0		47.876. 640.00 0		48.963. 219.00 0
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,0 5	350.00 0.000	3,0 5	350.00 0.000	3,0 5	251.15 3.000
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						350.00 0.000		350.00 0.000		251.15 3.000
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	10 0	350.00 0.000	10 0	350.00 0.000	10 0	251.15 3.000
		X.XX.01. 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					350.00 0.000		350.00 0.000		251.15 3.000
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	10 0	350000 000	10 0	350000 000	10 0	251.15 3.000
		X.XX.01. 1.01.000 1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.00 0.000		150.00 0.000		89.326. 000
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	150.00 0.000	10	150.00 0.000	10	89.326. 000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
								RKPD		APBD		P-RKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		161.827.000
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan		21	200.000.000	21	200.000.000	21	161.827.000

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan salah satu bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Perjanjian Kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang mengikat dalam hal kinerja guna memastikan bahwa penugasan dari pimpinan dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh penerima amanah. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*Reward and Punishment*);
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, serta segala sumber daya yang dimiliki. Sehingga dalam Perjanjian Kinerja terdapat Indikator Kinerja sebagai salah satu tolok ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat.

Selain perjanjian kerja antara Kepala Daerah dan Kepala SKPD, perjanjian kinerja juga dibuat sebagai penugasan dari pimpinan instansi tertinggi kepada pimpinan di level di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pengukuran Keterkaitan Perjanjian kinerja sasaran dilakukan berdasar pada Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis telah dijelaskan pada tabel diatas, dengan capaian sebagaimana tersaji pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2. 5

KETERKAITAN PERJANJIAN KINERJA BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tujuan : Meningkatkan Kompetensi ASN	Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,08
	Sasaran : ➢ Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN ➢ Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN	➢ Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi ➢ Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	% %	17,34 100
2	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah)	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah	Angka	73
	Sasaran : ➢ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah ➢ Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	➢ Indeks Kepuasan Masyarakat ➢ Indeks Manajemen Risiko	Angka Angka	80 3,05

Sebagai wujud penugasan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program dengan kegiatannya yang didukung APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 79.694.942.000,- adapun rincian sebagaimana disajikan pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2. 6

KETERKAITAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah ➢ Administrasi Keuangan ➢ Administrasi Barang ➢ Administrasi Pendapatan Daerah ➢ Administrasi Kepegawaian ➢ Administrasi Umum ➢ Pengadaan Barang ➢ Penyediaan Jasa Penunjang ➢ Pemeliharaan Barang	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Rp 48.712.066.000,-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 % Rp. 251.153.000,-
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	85%
			Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	3,50 Rp. 29.444.207.000,-
			Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	100 %
			Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	100 %
			Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial	100 %
		➢ Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Teknis	100 % Rp. 1.287.516.000,-
	JUMLAH			Rp. 79.694.942.000,-

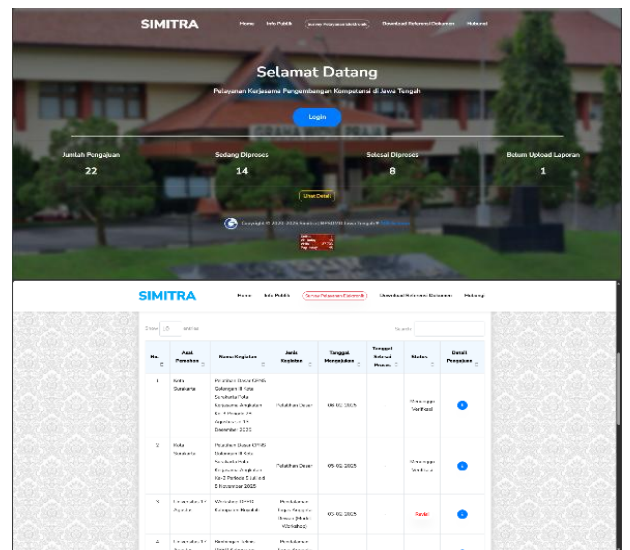
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN, menerapkan prinsip "*TECHNO TRAINING CENTER*", yaitu penyelenggaraan pelatihan ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dengan memanfaatkan sebuah portal aplikasi yang diberi nama SIMAPAN SDM. Di dalam portal aplikasi tersebut terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ini didukung dengan beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

- SIMITRA (Sistem Informasi Kemitraan) merupakan aplikasi berbasis website yang dibangun untuk Mempermudah proses pengajuan rekomendasi penyelenggaraan pelatihan pola kerjasama oleh Pemkab/Pemkot, OPD Provinsi, dan PTN/PTS; Menerbitkan surat rekomendasi oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah; serta Menyediakan pelayanan yang CEPAT dan MUDAH TERINTEGRASI



3. PELAKSANAAN

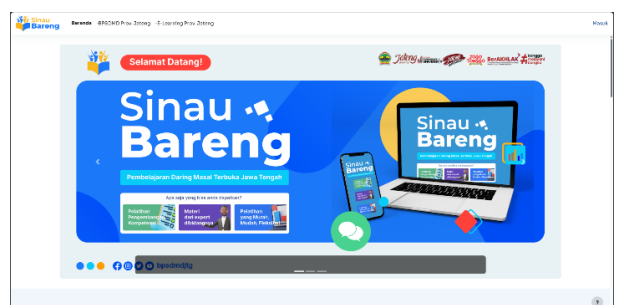
- Registrasi/pendaftaran online (SIMAPAN SDM) adalah sistem pendaftaran peserta dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan baik oleh internal maupun eksternal.



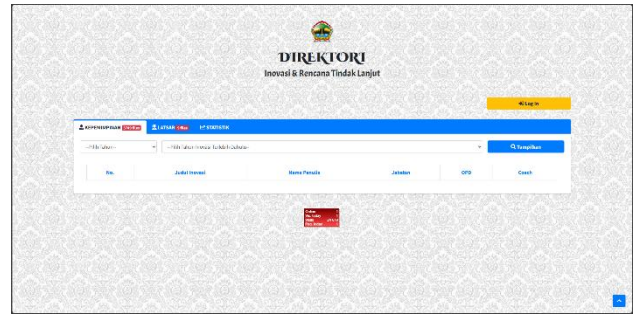
- SIP Tenan atau Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN merupakan LMS (Learning Management System) yang dikembangkan dan dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



- MOOC (Massive Open Online Course) merupakan salah satu platform yang digunakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan pengembangan kompetensi secara daring / virtual yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.



- CoE (Center of Excellence) atau Inovasi & Rencana Tindak Lanjut merupakan direktori hasil inovasi peserta pengembangan kompetensi



- Infografis merupakan aplikasi informasi data sektoral bpsdmd provinsi jawa tengah



- Sifika merupakan Sistem Informasi data Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah



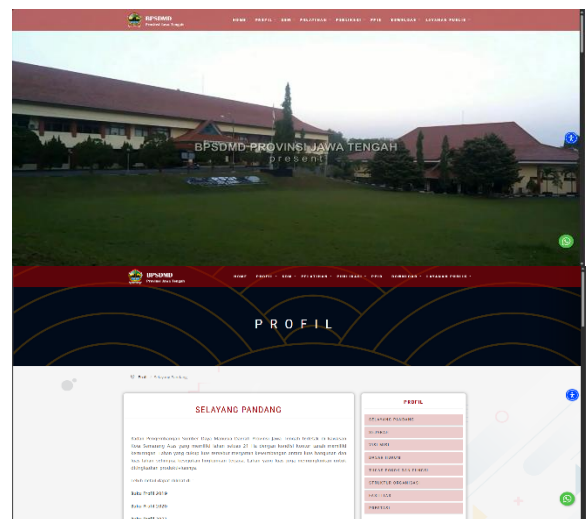
4. EVALUASI

Evaluasi Online merupakan sistem evaluasi online untuk tenaga pengajar selama Kegiatan Pengembangan Kompetensi.

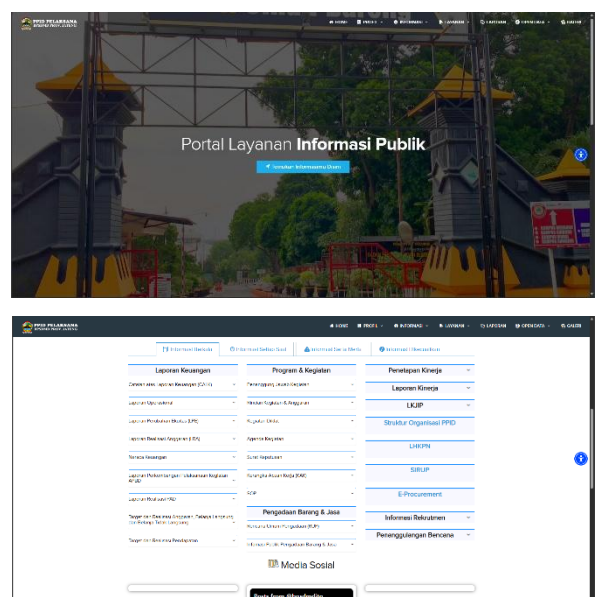


5. PELAYANAN PUBLIK

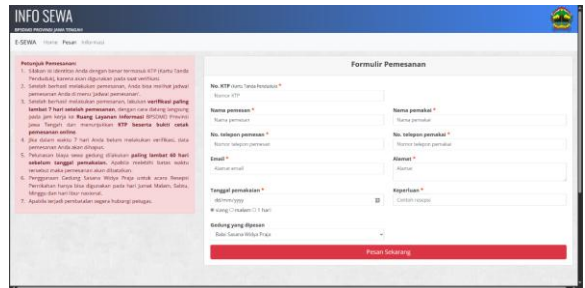
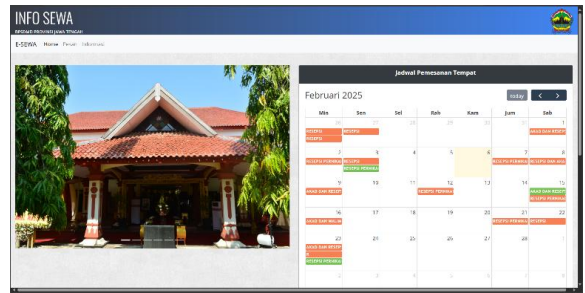
- Website BPSDMD Provinsi Jawa Tengah merupakan halaman yang berisikan segala informasi mengenai lembaga baik profil maupun kegiatan kelembagaan yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.



- Web PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah merupakan halaman yang berisikan seluruh informasi layanan publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah baik yang bersifat berkala maupun setiap saat.



- E-Sewa merupakan Sistem Informasi Penyewaan Gedung Aula / Asrama BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.



- E-Publik merupakan Sistem Informasi Pelayanan Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Dari sisi akuntabilitas, capaian kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : $\geq 91\%$;
- b. Baik : 76 – 90,99%;
- c. Cukup : 66 – 75,99%;
- d. Kurang : 51 – 65,99%;
- e. Sangat Kurang : $\leq 50,99\%$.

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3 . 1

**CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025 DAN TARGET AKHIR RPD**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPD
				Target	Realisasi	Persentase	
I.	TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN	Indeks Kompetensi ASN	angka	3,08	3,92	127,27%	3,10
	SASARAN 1 : Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi Asn	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	17,34	84,22	485,7%	26,10
	SASARAN 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi Asn	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100	100	100%	100
II.	TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	angka	73	85,04	116,5%	74
	SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	80	89,98	112,475%	80
	SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	angka	3,05	2,96	97,05%	3,10

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta tahun ini;

Tabel 3 . 2
**CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN BPSDMD
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
I.	TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN	Indeks Kompetensi ASN	3,08	3,92	127,27%	Sangat Baik	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
	SASARAN 1 : Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi Asn	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	17,34	84,22	485,7%	Sangat Baik	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
	SASARAN 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi Asn	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	100	100	100%	Sangat Baik	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
II.	TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	73	85,04	116,5%	Sangat Baik	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
	SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	89,98	112,475%	Sangat Baik	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
	SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,05	2,96	97,05%	Baik	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu sesuai dengan RPD 2024-2026;

Tabel 3 . 3

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2025

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
I.	TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN	Indeks Kompetensi ASN	-	-	-	3,07	3,29	107,00%	3,08	3,92	127,27%
	SASARAN 1 : Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	-	-	-	8,67	65,09	750,75%	17,34	84,22	485,7%
	SASARAN 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	-	-	-	100	100	100%	100	100	100%
II.	TUJUAN 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	-	-	-	72	86,61	120,29%	73	85,04	116,5%
	SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	80	88,75	110,94%	80	89,98	112,475 %
	SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	3	2,89	96,33%	3,05	2,96	97,05%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3 . 4

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR TAHUN 2026 BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
I.	TUJUAN 1 : Meningkatkan Kompetensi Asn	Indeks Kompetensi ASN	127,27%	105,97%	Sangat baik
	SASARAN 1 : Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi Asn	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan	485,7%	249,39%	Sangat baik

		kompetensi			
	SASARAN 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi Asn	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	100%	100%	Sangat baik
II.	TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	116,5%	117,04%	Sangat baik
	SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	112,475%	100%	Sangat baik
	SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	97,05%	103,34%	Baik

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3 . 5

**ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
I.	TUJUAN 1 : Meningkatkan Kompetensi Asn	Indeks Kompetensi ASN	3,08	3,92	127,27%	Ketercapaian dikarenakan	-
	SASARAN 1 : Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi Asn	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	17,34	84,22	485,7%	Ketercapaian dikarenakan inovasi yang mampu mengakomodasi pengembangan kompetensi tanpa batasan waktu dengan biaya terjangkau	Mereview dan menyesuaikan target pada dokumen perencanaan
	SASARAN 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi Asn	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	100	100	100%	Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan	Mempertahankan capaian yang ada
II.	TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	73	85,04	116,5%	Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan	Mereview dan menyesuaikan target pada dokumen perencanaan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	89,98	112,475 %	Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan	Mereview dan menyesuaikan target pada dokumen perencanaan
	SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,05	2,96	97,05%	Ada beberapa parameter dari inspektorat yang belum dapat dipenuhi secara maksimal	Menindaklanjuti catatan yang disampaikan oleh Inspektorat

Tujuan dan sasaran capaian realisasi rata-rata diatas 100% dari target yang telah ditetapkan sehingga tidak diperlukan solusi. Adapun IKU yang capaiannya melebihi target RKPD, antara lain indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi (485,70%), disebabkan adanya berbagai terobosan seperti sistem yang terintegrasi, penerapan jenis dan metode pembelajaran yang kekinian seperti MOOC sehingga pengembangan kompetensi dapat diikuti oleh semua ASN di Provinsi Jawa Tengah.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

Tabel 3 . 6

PENGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN/KEUANGAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

No	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1.	TUJUAN 1 : Meningkatkan Kompetensi ASN	3,08	3,92	127,27%	30.731.723.000	20.576.821.337	97,77	2,23%
	SASARAN 1: Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN	17,34	84,22	485,7%	30.338.458.000	26.804.789.202	88,35	11,65%
	SASARAN 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN	100	100	100%	393.265.000	388.204.970	98,71	1,29%
2.	TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah	73	85,04	116,5%	48.963.219.000	46.842.392.129	95,65	4,35%
	SASARAN 1 : Meningkatnya	80	89,98	112,475%	48.712.066.000	46.591.397.142	95,67	4,33%

No	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
	kualitas pelayanan perangkat daerah							
	SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	3,05	2,96	97,05%	251.153.000	250.994.987	99,94	0,06%
	RATA-RATA			173,17			96,02	

Efisiensi capaian anggaran BPSDMD masuk kategori sangat efisien dikarenakan dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 96,02% mampu mencapai hasil sangat optimal di rata-rata capaian kinerja sebesar 173,17%. Hal ini dapat tercapai antara lain karena memaksimalkan metode kekinian seperti MOOC dan blended learning pada mayoritas kegiatan pengembangan kompetensi sehingga mampu memfasiliasi ASN dalam memenuhi kewajiban 20 JP pengembangan kompetensi per tahunnya.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3 . 7

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET TAHUN 2024
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Tujuan/ Sasaran	Target	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1.	TUJUAN 1 : Meningkatkan Kompetensi ASN	3,08	127,27%				
	SASARAN 1: Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN	17,34	485,69%	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1. Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	100 %	Menunjang
					2. Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	100 %	Menunjang
					3. Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	262,5 %	Menunjang
					4. Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	166,67 %	Menunjang
					5. Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	100 %	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Target	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					nakan		
					6. Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	100 %	Menunjang
					7. Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	146,15 %	Menunjang
					8. Jumlah pelatihan yang diakreditasi	166,67 %	Menunjang
					9. Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	200 %	Menunjang
					10. Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	99,09 %	Menunjang
					11. Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	100 %	Menunjang
					12. Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	133,33 %	Menunjang
					13. Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	98,91 %	Menunjang
					14. Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	675,13 %	Menunjang
					15. Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	105,01 %	Menunjang
					16. Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	118,63 %	Menunjang
					17. Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	109,62 %	Menunjang
	SASARAN 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN	100 %	100 %	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1. Jumlah kualifikasi asesor kompetensi yang dimiliki	100 %	Menunjang
					2. Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	100 %	Menunjang
					3. Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	100 %	Menunjang
2.	TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Perangkat	73	116,49%				

No	Tujuan/ Sasaran	Target	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Daerah						
	SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	80	112,47%	Administrasi Keuangan	1. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %	Menunjang
2. Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN					100 %	Menunjang	
3. Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan					100 %	Menunjang	
4. Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran perangkat daerah yang disusun					100 %	Menunjang	
5. Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa					100 %	Menunjang	
6. Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran					100 %	Menunjang	
7. Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi					100 %	Menunjang	
Administrasi Umum				8. Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Menunjang	
				9. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100 %	Menunjang	
				10. Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	100 %	Menunjang	
				11. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti	100 %	Menunjang	

No	Tujuan/ Sasaran	Target	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					pendidikan dan pelatihan		
					12. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %	Menunjang
					13. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	Menunjang
					14. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100 %	Menunjang
					15. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	Menunjang
					16. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 %	Menunjang
					17. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 %	Menunjang
					18. Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100 %	Menunjang
					19. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	100 %	Menunjang
					20. Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	100 %	Menunjang
					21. Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	100 %	Menunjang
					22. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100 %	Menunjang
					23. Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100 %	Menunjang
					24. Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	100 %	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Target	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					25. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100 %	Menunjang
					26. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100 %	Menunjang
					27. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100 %	Menunjang
					28. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100 %	Menunjang
					29. Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	100 %	Menunjang
					30. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 %	Menunjang
					31. Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 %	Menunjang
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	Menunjang
	SASARAN 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	3,05	97,05%	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100 %	Menunjang
					2. Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Menunjang

3.2. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

Tabel 3 . 8

REALISASI ANGGARAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	79.694.942.000	74.035.386.301	92,90
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.963.219.000	46.842.392.129	95,67
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.153.000	250.994.987	99,94
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.786.590.000	26.542.966.794	95,52
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	232.000.000	230.807.476	99,49
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	39.694.000	39.618.367	99,81
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	173.612.000	172.360.150	99,28
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.502.850.000	1.475.049.853	98,15
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.610.937.000	5.255.392.657	93,66
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.698.290.000	9.280.969.962	95,70
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.668.093.000	3.594.231.883	97,99
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	30.731.723.000	27.192.994.172	88,49
	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.387.302.000	1.326.013.030	95,58
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	29.344.421.000	25.866.981.142	88,15

Secara garis besar capaian realisasi anggaran tidak ada yang kurang dari 80%, rerata pada level program dan kegiatan, anggaran yang telah disediakan dapat dimaksimalkan untuk mendukung indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian realisasi tidak dapat 100% karena penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi terhadap kebutuhan yang diperlukan seperti perjalanan dinas dan honorarium.

3.3 INOVASI

Sehubungan dengan tugas fungsi lembaga pelatihan terakreditasi, secara cepat dan menyeluruh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berinovasi menciptakan sebuah metode pembelajaran yang murah dan mudah untuk menjangkau kegiatan pengembangan kompetensi seluruh ASN di Jawa Tengah. Proses penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi ASN secara klasikal atau tatap muka sudah secara perlahan mulai ditinggalkan diganti dengan metode *blended* dan elearning, sebagai tindak lanjut dalam menghadapi situasi yang sedemikian rupa, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara daring atau online yang disebut (*Massive Online Open Courses*) atau lebih dikenal dengan MOOC.

Menyikapi adanya pergeseran paradigma pengembangan kompetensi dari sistem klasikal menjadi e-learning atau distance learning, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian dan inovasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi. Mulai dari penguatan sarana dan prasarana pelatihan. SIMAPAN ini terus berkembang, pengembangan Bang Sigra agar dapat dimaksimalkan oleh OPD khususnya dalam penyelenggaraan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri telah terwadahi dalam Bang Sigra ini. Tidak hanya bentuk rekapitulasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi namun sebuah terobosan agar memberikan ruang bagi OPD Provinsi Jawa Tengah khususnya agar turut memberikan kontribusi bagi terwujudnya pengembangan kompetensi ASN yang terus menerus sesuai dengan amanat UU ASN No 20 Tahun 2023. Satu Klik SIMAPAN SDM ini menjadi inovasi yang terintegrasi dari perencanaan sampai dengan evaluasi.



Gambar 3. 3. 1 Gambar Satu Klik SIMAPAN SDM

3.4 PENGHARGAAN

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan tugas pokok fungsinya terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam urusan pendidikan dan pelatihan dengan akreditasi dan sertifikasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima atas pelayanan dalam pengembangan kompetensi untuk ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan yang diperoleh antara lain BPSDMD Kementerian Dalam Negeri - Atas Terselenggaranya Internalisasi dan Sinkronisasi Program ASTA CITA dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3. 4. 1 Piagam Penghargaan Manunggal Leadership Retreat

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tidak akan mendapatkan hal ini tanpa *branding* Jateng Corpu yang kuat untuk memberikan pelayanan prima kepada stakeholder BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melalui beberapa kanal media yang dimiliki oleh BPSDMD yang pada tahun ini masih mempertahankan kategori Informatif dalam KIP Awards yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3. 4. 2 Piagam Penghargaan KIP Awards Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dengan memperhatikan pembahasan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka bisa disebutkan bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil capaian kinerja sesuai dengan realisasi target indikator tujuan dan sasaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Kesimpulan terhadap hasil kinerja tersebut didukung oleh data-data sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran pencapaian Sasaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sasaran Strategis "Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN" dengan realisasi sebesar 84,22 poin telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 17,34 poin atau dengan capaian sebesar 485,6978%.
 - b. Sasaran Strategis "Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN" dengan realisasi 100%, sesuai dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
 - c. Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah" nilai realisasinya sebesar 89,98 dari target 80 yang artinya telah melebihi dari target yang ditetapkan.
 - d. Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah", realisasinya sebesar 2,96 poin dan kurang dari target yang ditetapkan sebesar 3,05 poin.
2. Realisasi Anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2025 sebesar Rp. **74.035.386.301,-** atau **92,90%** dari total alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 79.694.942.000,-**

4.2. REKOMENDASI

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah agar lebih baik di masa mendatang, antara lain :

1. Implementasi Transformasi Pembelajaran melalui pelaksanaan Jawa Tengah Corporate University dalam akselerasi pengembangan kompetensi di Jawa Tengah, sehingga dapat menjadi problem solving dalam permasalahan organisasi.
2. Senantiasa menindaklanjuti perubahan kebijakan dari Instansi Pusat/Pembina terkait dengan Pengembangan Kompetensi terkini.
3. Dilakukan sosialisasi Pengembangan Kompetensi BPSDMD secara menyeluruh kepada seluruh stakeholder Multihelix, sehingga capaian kinerja BPSDMD dapat berjalan secara optimal khususnya pemenuhan IP ASN.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan di tahun mendatang.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

LAMPIRAN